

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Menggunakan Analisis *Value for Money* di Desa Pasirangka

Sri Pujiyanti^{1*}, Susilowati², Erni Yulianti³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Tangerang Raya, Indonesia

*Email: sripujiyanti22.sp@gmail.com

Alamat: Perumahan Sudirman indah Blok E RT. 006 RW. 006 Tigaraksa-Kab. Tangerang 15720

Abstract. *This study aims to measure the financial performance of the Pasirangka Village Government for the 2020–2024 period using the Value for Money (VfM) approach, which includes three main indicators: economy, efficiency, and effectiveness. The study uses secondary data obtained from the Village Budget Realization Report (LRA) of Pasirangka Village and is analyzed descriptively using ratio calculations in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 600.900.327 of 1996. The results indicate that, in general, the financial performance of Pasirangka Village is effective and efficient. However, the economic aspect faced challenges in 2022 and 2024. The inefficiency in 2022 was due to a new policy under the Regent Regulation of Tangerang No. 37 of 2022, which required the budgeting of the Decent Housing Program (RTLH) that was not anticipated in the initial APBDes. In 2024, rising inflation caused prices of goods and services to exceed budgeted amounts. Nevertheless, efficiency and effectiveness remained maintained, with revenue generally meeting or exceeding targets. These findings highlight the importance of accurate and adaptive budget planning in response to changing conditions and new policies. The study recommends several strategic steps to improve village financial performance, including enhancing budget planning accuracy, anticipating new policies, and adjusting projections for goods and services prices. Implementing these recommendations can ensure the sustainability of Pasirangka Village's financial performance, support effective, efficient, and economical use of the budget, and maintain optimal public service delivery. This study contributes valuable insights for village financial management and serves as a reference for other villages to systematically apply Value for Money analysis to increase transparency and accountability.*

Keywords: *Financial Performance; Value For Money; Village Budget; Village Efficiency; Village Government.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Desa Pasirangka pada periode 2020–2024 menggunakan pendekatan Value for Money (VfM), yang mencakup tiga indikator utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Pasirangka, dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan perhitungan rasio sesuai Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Desa Pasirangka tergolong efektif dan efisien. Namun, aspek ekonomi mengalami tantangan pada tahun 2022 dan 2024. Ketidakekonomisan pada tahun 2022 disebabkan adanya kebijakan baru melalui Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No. 37 Tahun 2022, yang mewajibkan penganggaran program Rumah Layak Huni (RTLH) yang belum diantisipasi dalam APBDes awal. Sementara pada tahun 2024, inflasi yang meningkat menyebabkan harga barang dan jasa lebih tinggi sehingga realisasi belanja melebihi anggaran. Meskipun demikian, efisiensi dan efektivitas tetap terjaga dengan capaian pendapatan yang umumnya memenuhi bahkan melampaui target. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang akurat dan adaptif terhadap perubahan kondisi serta kebijakan baru. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan desa, yaitu peningkatan akurasi perencanaan anggaran, antisipasi terhadap kebijakan baru, dan penyesuaian proyeksi harga barang dan jasa. Dengan penerapan rekomendasi ini, keberlanjutan kinerja keuangan Desa Pasirangka dapat lebih terjaga, mendukung penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis, sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengelolaan keuangan desa serta menjadi acuan bagi desa lain dalam menerapkan analisis Value for Money secara sistematis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: Anggaran Desa; Efisiensi Desa; Kinerja Keuangan; Pemerintah Desa; Value for Money.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan kewenangan tersebut adalah pengelolaan keuangan desa yang harus memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sesuai konsep Value for Money (Mardiasmo, 2020).

Penelitian mengenai kinerja keuangan desa berbasis Value for Money telah banyak dilakukan. Misalnya, Aisyah dan Sugiartono (2021) menemukan bahwa sebagian besar desa mampu mencapai efektivitas tinggi, tetapi masih terdapat kendala dalam aspek ekonomi akibat perencanaan anggaran yang kurang tepat. Sementara itu, Sholikhah dan Khoiriawati (2022) menyoroti bahwa ketidakekonomisan sering terjadi karena adanya kebijakan mendadak yang tidak diantisipasi dalam perencanaan awal. Penelitian Dewi dan Werastuti (2023) menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia desa dalam memastikan pengelolaan dana yang efisien.

Berbeda dari penelitian terdahulu, kajian ini secara khusus menganalisis kinerja keuangan Desa Pasirangka selama periode lima tahun (2020–2024) dengan fokus pada identifikasi faktor penyebab ketidakekonomisan pada tahun tertentu. Penelitian ini mengaitkan analisis rasio dengan perubahan kebijakan daerah dan dampak inflasi sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan desa.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Desa Pasirangka dilihat dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas berdasarkan konsep *Value for Money*, serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakekonomisan pada tahun 2022 dan 2024.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Desa Pasirangka pada periode 2020–2024 berdasarkan konsep *Value for Money*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil pengukuran pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengukuran kinerja keuangan desa berdasarkan konsep *Value for Money* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran desa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan biaya yang wajar (Afriza, 2020). Konsep ini terdiri dari tiga indikator utama. Pertama, indikator ekonomi mengukur kemampuan pemerintah desa dalam memperoleh barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga yang serendah mungkin (Mahdita et al., 2021). Dalam konteks Desa Pasirangka, rasio ekonomi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja, di mana nilai rasio di bawah 100% menunjukkan pengelolaan yang ekonomis (Kepmendagri No. 600.900.327/1996). Kedua, indikator efisiensi menilai hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Efisiensi diukur melalui perbandingan antara total belanja dan total pendapatan desa, dengan kategori efisien jika rasio berada di bawah 100% (Mahmudi, 2019). Ketiga, indikator efektivitas mengukur sejauh mana target pendapatan desa dapat tercapai atau bahkan melampaui realisasi. Rasio efektivitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan, di mana nilai di atas 100% mencerminkan kinerja yang sangat efektif (Mardiasmo, 2021). Selain indikator utama tersebut, kajian ini juga didasari oleh teori akuntabilitas publik dan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban aparat desa dalam mengelola dana publik (Gustiani & Hertanto, 2020). Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan fokus pada pengukuran kinerja keuangan desa berdasarkan konsep *Value for Money* yang terdiri dari tiga indikator utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Lokasi penelitian adalah Desa Pasirangka, Kabupaten Tangerang, dengan periode kajian tahun anggaran 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara dokumentasi dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Pasirangka, yang memuat informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja desa. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran arsip resmi desa dan konfirmasi dengan aparat desa terkait untuk memastikan akurasi data.

Analisis data dilakukan menggunakan rumus rasio kinerja keuangan sesuai Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, yaitu:

Rasio Ekonomi

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1. Rasio Ekonomi.

Presentase Rasio Ekonomis	Kriteria Rasio Ekonomis
< 90%	Sangat Ekonomis
90% - 94,99%	Ekonomis
95% - 100%	Cukup Ekonomis
100,01% - 105%	Kurang Ekonomis
>105%	Tidak Ekonomis

Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran pendapatan}}{\text{Target anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Rasio Efisiensi.

Presentase Rasio Efisiensi	Kriteria Rasio Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat Efisien

Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran pendapatan}}{\text{Target anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3. Rasio Efektivitas.

Presentase Rasio Efektivitas	Kriteria Rasio Efektivitas
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah dari 60%	Tidak Efektif

Hasil perhitungan rasio tersebut diinterpretasikan dengan membandingkan nilai rasio tiap tahun terhadap standar penilaian untuk menentukan kategori kinerja. Selain itu, dilakukan analisis kontekstual untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan rasio, seperti perubahan kebijakan daerah, kondisi ekonomi makro (misalnya inflasi), dan faktor internal desa terkait perencanaan anggaran.

Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran kuantitatif yang jelas mengenai tingkat pencapaian kinerja keuangan desa serta memudahkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Laporan Keuangan Desa Pasirangka periode tahun anggaran 2020-2024

Table 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Pasirangka tahun anggaran 2020-2024.

Tahun	Anggaran (Rp)	Pendapatan Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2020	2.380.309.396	2.375.598.586	99.80%
2021	2.763.327.000	2.761.549.920	99.94%
2022	2.663.966.423	3.012.676.003	113.07%
2023	3.993.117.000	3.804.895.451	95.29%
2024	3.684.756.526	3.955.573.540	107.35%

Sumber: Pengelola Keuangan Desa Pasirangka

Dari tahun 2020 hingga 2024, realisasi pendapatan Desa Pasirangka menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada 2020, realisasi mencapai 99,80% dari anggaran Rp2,38 miliar, menandakan pencapaian yang hampir sesuai rencana. Tahun berikutnya, capaian meningkat tipis menjadi 99,94% dari Rp2,76 miliar, mencerminkan konsistensi kinerja. Pada 2022, realisasi justru melampaui target dengan 113,08% dari Rp2,66 miliar, kemungkinan karena adanya tambahan penerimaan yang tidak diproyeksikan. Namun, 2023 mengalami penurunan menjadi 95,29% dari Rp3,99 miliar, diduga akibat kendala administratif atau keterlambatan pencairan dana. Memasuki 2024, kinerja kembali positif dengan realisasi 107,35%, melebihi anggaran yang direncanakan.

Secara umum, Desa Pasirangka menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mengelola dan merealisasikan pendapatan desa. Terlebih lagi, capaian realisasi yang melebihi target anggaran pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa potensi penerimaan desa cukup tinggi dan pengelolaannya relatif efektif. Namun demikian, fluktuasi capaian ini juga menjadi catatan penting agar ke depan perencanaan anggaran lebih realistis, akurat, dan disesuaikan dengan potensi riil serta memperhatikan faktor risiko yang dapat mempengaruhi proses pencapaian pendapatan.

Table 5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Pasirangka tahun anggaran 2020-2024.

Tahun	Anggaran (Rp)	Belanja	
		Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2020	2.411.993.406	2.404.369.950	99,68
2021	2.763.327.000	2.761.549.920	99,94
2022	2.669.298.227	2.985.811.872	111,86
2023	4.025.582.078	3.767.881.230	93,60
2024	3.737.568.299	3.913.792.977	104,72

Sumber: Pengelola Keuangan Desa Pasirangka

Realisasi belanja Desa Pasirangka pada 2020–2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2020, penyerapan anggaran mencapai 99,68% dari Rp2,41 miliar, diikuti peningkatan menjadi 99,94% dari Rp2,76 miliar pada 2021, mencerminkan pengelolaan anggaran yang sangat optimal. Tahun 2022 mencatat lonjakan hingga 111,85% dari Rp2,66 miliar, kemungkinan akibat pengeluaran mendesak atau tambahan dana di luar rencana. Pada 2023, realisasi turun menjadi 93,61% dari Rp4,02 miliar, mengindikasikan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai. Tahun 2024 kembali melebihi target dengan 104,72% dari Rp3,73 miliar, yang diduga terkait revisi anggaran atau penerimaan dana tambahan.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi belanja desa dalam lima tahun terakhir tergolong cukup baik, meskipun terdapat tahun-tahun di mana realisasi melampaui atau kurang dari anggaran. Hal ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan desa yang tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaan anggaran tetap berada dalam koridor peraturan dan efisiensi.

Analisa Data Pengukuran Kinerja dengan Value for money

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Desa Pasirangka dengan menggunakan metode Value for money yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas (Sampow, 2022).

Rasio Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis yaitu tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melakukan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggarannya.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{2.404.369.950}{2.411.993.406} \times 100\% \\ &= 99.68\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{2.761.549.920}{2.763.327.000} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 & 2.763.327.000 \\
 & = 99,94\% \\
 \text{Tahun 2022} & = \frac{2.985.811.872}{2.669.298.227} \times 100\% \\
 & = 111,86\% \\
 \text{Tahun 2023} & = \frac{3.767.881.230}{4.025.582.078} \times 100\% \\
 & = 93,60\% \\
 \text{Tahun 2024} & = \frac{3.913.792.977}{3.737.568.299} \times 100\% \\
 & = 104,72\%
 \end{aligned}$$

Tabel 6. Rasio Ekonomis Desa Pasirangka Tahun 2020-2024.

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Ekonomis (%)	Kategori
2020	Rp2.411.993.406	Rp2.404.369.950	99,68%	Ekonomis
2021	Rp2.763.327.000	Rp2.761.549.920	99,94%	Ekonomis
2022	Rp2.669.298.227	Rp2.985.811.872	111,86%	Tidak Ekonomis
2023	Rp4.025.582.078	Rp3.767.881.230	93,60%	Ekonomis
2024	Rp3.737.568.299	Rp3.913.792.977	104,72%	Tidak Ekonomis

Sumber: Pengelola Keuangan Desa Pasirangka diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio ekonomis, dapat diperoleh hasil dan kriteria sebagai berikut: Pada tahun 2020, anggaran belanja pemerintah desa sebesar Rp2.411.993.406 dengan realisasi belanja mencapai Rp2.404.369.950, menghasilkan rasio ekonomis sebesar 99,68%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran desa sangat mendekati jumlah anggaran yang direncanakan, sehingga dapat dikategorikan sebagai ekonomis, karena dana dapat dimanfaatkan secara efisien dengan penghematan kecil.

Tahun 2021 menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi, dengan anggaran sebesar Rp2.763.327.000 dan realisasi belanja sebesar Rp2.761.549.920, sehingga rasio ekonomis tercatat sebesar 99,94%. Ini berarti belanja dilakukan hampir sepenuhnya sesuai rencana tanpa pemborosan, dan dengan selisih yang sangat kecil, sehingga tetap termasuk dalam kategori ekonomis.

Namun, pada tahun 2022, angka realisasi belanja desa melonjak hingga Rp 2.985.811.872, sedangkan anggaran semula hanya sebesar Rp 2.669.298.227, menghasilkan rasio ekonomis mencapai 111,86%, yang menunjukkan pengeluaran melebihi alokasi dan menjadi tidak ekonomis. Salah satu penyebabnya adalah keharusan desa memasukkan anggaran untuk program Rumah Layak Huni

(RTLH) sesuai dengan Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2022, yang menetapkan pedoman penggunaan anggaran desa untuk program tersebut.

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2022 mewajibkan alokasi dana desa untuk penyediaan Rumah Layak Huni (RLH), sehingga desa harus mengalokasikan anggaran bahkan jika hal itu tidak sepenuhnya diantisipasi saat perencanaan awal. Ketika anggaran dialihkan demi memenuhi ketentuan tersebut tanpa mendukung alokasi yang memadai atau pergeseran dilakukan tanpa mekanisme perubahan APBDes yang memadai, belanja menjadi melewati batas yang direncanakan. Dengan demikian, ketidakekonomisan pada tahun 2022 dapat dipahami sebagai akibat dari kewajiban integrasi program RLH dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sesuai ketentuan Perbup 37/2022, tanpa adanya fleksibilitas atau penyesuaian anggaran yang memadai.

Kondisi mulai membaik pada tahun 2023, dengan anggaran sebesar Rp4.025.582.078 dan realisasi belanja sebesar Rp3.767.881.230. Rasio ekonomisnya adalah 93,60%, yang menunjukkan bahwa realisasi lebih kecil dari anggaran, dan belanja dilakukan dengan hemat. Oleh karena itu, tahun ini kembali masuk dalam kategori ekonomis.

Sebaliknya, tahun 2024 kembali menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Dengan anggaran sebesar Rp3.737.568.299, realisasi belanja justru lebih besar yaitu Rp3.913.792.977, menghasilkan rasio ekonomis sebesar 104,72%. Ini berarti belanja desa melebihi anggaran, sehingga masuk dalam kategori tidak ekonomis karena terdapat pemborosan atau pengeluaran yang melampaui perencanaan.

Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah tekanan inflasi yang tidak sepenuhnya diantisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Kenaikan harga barang dan jasa, seperti bahan bangunan, alat operasional, serta kebutuhan kegiatan desa lainnya, menyebabkan realisasi belanja menjadi lebih tinggi dari perkiraan awal. Akibatnya, meskipun volume kegiatan tidak berubah secara signifikan, biaya pelaksanaannya meningkat dan melampaui pagu anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disusun tidak cukup adaptif terhadap fluktuasi harga pasar. Ketidakekonomisan ini dapat diminimalisasi apabila desa menggunakan proyeksi inflasi dalam penyusunan anggaran serta menyiapkan dana cadangan atau pos belanja fleksibel untuk mengantisipasi perubahan harga di tengah tahun anggaran (Mahrofi, 2022).

Secara keseluruhan, dalam periode lima tahun, pemerintah desa mampu menunjukkan kinerja belanja yang ekonomis pada sebagian besar tahun, namun terdapat dua tahun (2022 dan 2024) di mana realisasi belanja melebihi anggaran, menunjukkan perlunya pengawasan dan pengendalian anggaran yang lebih ketat. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan agar kegiatan serupa di masa mendatang dapat menghasilkan output yang sebanding atau lebih besar dari input yang digunakan (Gunawan & Fauziah, 2025).

Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2021).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Realisasi anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{2.404.369.950}{2.375.598.586} \times 100\% \\ &= 98,80\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp}2.761.549.920}{2.761.549.920} \times 100\% \\ &= 100,00\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{\text{Rp}2.985.811.872}{3.012.676.003} \times 100\% \\ &= 100,90\% \\ \text{Tahun 2023} &= \frac{\text{Rp}3.767.881.230}{3.804.895.451} \times 100\% \\ &= 100,98\% \\ \text{Tahun 2024} &= \frac{\text{Rp}3.913.792.977}{3.955.573.540} \times 100\% \\ &= 101,06\% \end{aligned}$$

Tabel 7. Rasio Efisiensi Desa Pasirangka Tahun 2020-2024.

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
2020	Rp2.375.598.586	Rp2.404.369.950	98,80%	Efisien
2021	Rp2.761.549.920	Rp2.761.549.920	100,00%	Efisien
2022	Rp3.012.676.003	Rp2.985.811.872	100,90%	Efisien
2023	Rp3.804.895.451	Rp3.767.881.230	100,98%	Efisien
2024	Rp3.955.573.540	Rp3.913.792.977	101,06%	Efisien

Sumber: Pengelola Keuangan Desa Pasirangka diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio efisiensi, dapat diperoleh hasil dan kriteria sebagai berikut: Pada tahun 2020, realisasi pendapatan pemerintah desa tercatat sebesar

Rp2.375.598.586, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp2.404.369.950. Rasio efisiensi yang dihasilkan adalah 98,80%, yang berarti bahwa belanja desa lebih besar sedikit dari pendapatan, namun masih dalam batas efisien karena pengeluaran mampu mendekati kemampuan pendapatan tanpa terjadi pemborosan besar. Dengan demikian, tahun ini dikategorikan sebagai efisien.

Pada tahun 2021, terjadi keseimbangan sempurna antara realisasi pendapatan dan belanja, masing-masing sebesar Rp2.761.549.920. Rasio efisiensi tercatat 100,00%, menandakan bahwa semua pendapatan dimanfaatkan secara optimal dalam belanja desa. Tidak terdapat kelebihan atau kekurangan anggaran, sehingga tahun ini menunjukkan tingkat efisiensi yang maksimal dan sangat ideal dalam pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, pada tahun 2022, realisasi pendapatan desa mencapai Rp3.012.676.003, sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja sebesar Rp2.985.811.872. Hal ini menghasilkan rasio efisiensi sebesar 100,90%, yang tetap berada dalam kategori efisien, karena belanja dikelola dengan baik dalam batas kemampuan pendapatan, bahkan masih menyisakan surplus kecil yang bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Tahun 2023 juga menunjukkan hasil yang positif dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.804.895.451 dan belanja sebesar Rp3.767.881.230. Rasio efisiensi tercatat 100,98%, mengindikasikan bahwa belanja sangat mendekati pendapatan, dan pemerintah desa mampu mengelola anggarannya dengan sangat baik tanpa mengalami defisit, sehingga tetap masuk dalam kategori efisien.

Pada tahun 2024, realisasi pendapatan mencapai Rp3.955.573.540, sementara realisasi belanja berada di angka Rp3.913.792.977. Rasio efisiensi sebesar 101,06% menunjukkan bahwa seluruh pendapatan digunakan hampir sepenuhnya untuk belanja, bahkan sedikit melebihi nilai ideal, namun masih dalam batas wajar dan tetap dikategorikan efisien, karena menunjukkan pemanfaatan dana secara maksimal.

Secara umum, selama periode lima tahun, pemerintah desa menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang efisien setiap tahunnya, dengan belanja yang proporsional terhadap pendapatan yang diperoleh. Ini mencerminkan pengendalian anggaran yang baik dan perencanaan keuangan desa yang terukur.

Rasio Efektifitas

Pengukuran tingkat efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Sholikhah & Khoiriawati, 2022).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran pendapatan}}{\text{Target anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{2.375.598.586}{2.380.309.396} \times 100\% \\ &= 99,80\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{2.761.549.920}{2.763.327.000} \times 100\% \\ &= 99,94\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{3.012.676.003}{2.663.966.423} \times 100\% \\ &= 113,07\% \\ \text{Tahun 2023} &= \frac{3.804.895.451}{3.993.117.000} \times 100\% \\ &= 95,29\% \\ \text{Tahun 2024} &= \frac{3.955.573.540}{3.684.756.526} \times 100\% \\ &= 107,35\% \end{aligned}$$

Tabel

Tabel 8. Rasio Efektivitas Desa Pasirnangka Tahun 2020-2024.

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas (%)	Kategori
2020	Rp2.380.309.396	Rp2.375.598.586	99,80%	Efektif
2021	Rp2.763.327.000	Rp2.761.549.920	99,94%	Efektif
2022	Rp2.663.966.423	Rp3.012.676.003	113,07%	Efektif
2023	Rp3.993.117.000	Rp3.804.895.451	95,29%	Efektif
2024	Rp3.684.756.526	Rp3.955.573.540	107,35%	Efektif

Sumber: Pengelola Keuangan Desa Pasirnangka diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio efektifitas, dapat diperoleh hasil dan kriteria sebagai berikut :

Pada tahun 2020, pemerintah desa menetapkan anggaran pendapatan sebesar Rp2.380.309.396, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp2.375.598.586. Rasio efektifitas yang dicapai adalah 99,80%, menunjukkan bahwa target pendapatan hampir sepenuhnya tercapai. Hal ini mencerminkan kinerja yang efektif, karena pencapaian pendapatan sangat mendekati perencanaan.

Tahun 2021 mencatat kinerja yang sedikit lebih baik, dengan anggaran pendapatan sebesar Rp2.763.327.000 dan realisasi sebesar Rp2.761.549.920. Rasio efektivitasnya adalah 99,94%, yang menunjukkan bahwa desa berhasil menghimpun pendapatan hampir sempurna sesuai dengan target. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan realisasi pendapatan desa berjalan sangat efektif.

Pada tahun 2022, capaian pendapatan justru melampaui target. Dari anggaran sebesar Rp2.663.966.423, realisasi yang diperoleh mencapai Rp3.012.676.003, menghasilkan rasio efektivitas sebesar 113,07%. Hal ini menandakan bahwa desa mampu menghimpun pendapatan melebihi ekspektasi, yang menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan pendapatan desa pada tahun ini sangat efektif, bahkan sangat baik.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2023 mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp3.804.895.451, lebih rendah dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.993.117.000. Rasio efektivitasnya adalah 95,29%, yang masih tergolong efektif, meskipun terdapat sedikit penurunan pencapaian dibandingkan target. Hal ini tetap menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan masih dalam batas yang wajar dan dapat diterima.

Pada 2024, pendapatan Desa Pasirangka mencapai Rp3,96 miliar dari anggaran Rp3,68 miliar, dengan rasio efektivitas 107,35%. Capaian ini menunjukkan desa mampu melampaui target secara signifikan, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan yang sangat baik. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir, kinerja efektivitas pendapatan desa konsisten baik, dengan realisasi yang umumnya mendekati atau melebihi target anggaran.

Pada 2022 dan 2024, rasio ekonomi Desa Pasirangka berada di atas 100%, menandakan pengeluaran melebihi anggaran dan dikategorikan tidak ekonomis. Kondisi ini dipicu faktor eksternal seperti inflasi serta kebijakan mendadak, termasuk Perbup Kabupaten Tangerang No. 37 Tahun 2022 tentang program RTLH. Meski demikian, rasio efisiensi dan efektivitas tetap baik, menunjukkan penggunaan sumber daya yang optimal dan pencapaian program sesuai bahkan melampaui target. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakekonomisan lebih terkait perencanaan anggaran yang kurang adaptif, sedangkan pelaksanaan program tetap produktif dan tepat sasaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Pasirnangka pada periode 2020–2024 secara umum telah memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas, meskipun terdapat ketidakekonomisan pada tahun 2022 dan 2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketidakekonomisan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan mendadak dan tekanan inflasi, bukan karena pemborosan atau kesalahan manajemen internal. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kinerja keuangan desa efektif dan efisien terbukti benar, namun aspek ekonomi masih memerlukan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan strategis.

Saran

Perbaikan Perencanaan Anggaran

Pemerintah desa perlu mengembangkan mekanisme perencanaan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan harga maupun kebijakan, misalnya melalui penganggaran kontinjensi untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak.

Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur desa perlu dibekali pelatihan perencanaan keuangan dan manajemen risiko untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat proyeksi anggaran yang akurat dan responsif.

Penguatan Sistem Pengawasan

Pengawasan internal harus diperkuat, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan, agar potensi penyimpangan atau ketidakekonomisan dapat diminimalkan sejak awal.

Arah Penelitian Lanjutan

Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan pendekatan komparatif antar desa di wilayah yang sama, atau menggunakan perspektif *longitudinal* untuk mengidentifikasi pola kinerja keuangan dalam siklus ekonomi yang lebih panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Afriza, M. N. (2020). *Value for Money dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aisyah Hadaryen, & Sugiartono. (2021). Analisis kinerja keuangan desa berdasarkan konsep Value for Money. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 45-58.

- Dewi, N. P., & Werastuti, D. N. S. (2023). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa Lokasari. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Daerah*, 9(1), 112-125. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i1.177>
- Gunawan, & Fauziah, L. N. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1161–1169. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4004>
- Gustiani, R., & Hertanto, B. (2020). Prinsip good governance pada pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 76-89.
- Harindra, I., & Sapari, S. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/246>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194 Tahun 1996 tentang Perubahan Kepmendagri No. 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota TK II. JDIH Kota Bandung. <https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan-pusat/14967>
- Mahdita, S., Rahayu, D., & Putri, F. (2021). Penerapan Value for Money pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 5(3), 190-202.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahrofi, Z. (2022, September 4). Pengendalian inflasi tingkat desa melalui Dana Desa. ANTARA News. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3098381/pengendalian-inflasi-tingkat-desa-melalui-dana-desa>
- Mardiasmo. (2020). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2021). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Penyediaan Rumah Layak Huni. (2022). Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- Sampow, R. R. (2022). Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode Value for Money pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 8(2), 169–188. <https://doi.org/10.35870/jiar.v8i2.432>
- Sholikhah, N., & Khoiriawati, S. (2022). Analisis Value for Money dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucangsimo. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Desa*, 6(2), 123–135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.